

PENDIDIKAN KEBUDAYAAN BALI (PKB) SEBAGAI STRATEGI MEWUJUDKAN AJEG BALI

I Wayan Rai

Fakultas Olah Raga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Ganesha, Jln. Udayana Singaraja

Abstrak: Artikel ini mengkaji masalah perubahan sosial budaya pada masyarakat Bali yang disebabkan oleh globalisasi. Hal ini menimbulkan kegelisahan pada masyarakat Bali tentang keberlanjutan kebudayaan Bali. Karena itu, muncul wacana tentang *Gerakan Ajeg Bali* sebagai solusi untuk mempertahankan ke-ajeg-an kebudayaan Bali. Dalam konteks inilah pendidikan bisa memainkan peran penting, yakni berwujud Pendidikan Kebudayaan Bali (PKB). PKB bisa diterapkan pada lembaga pendidikan formal, dengan tujuan tidak saja menjadikan orang Bali secara fisik (penampilan), tetapi yang lebih penting adalah menjadi orang Bali sebagai orang Bali secara sosiobudaya. Dengan cara ini tercipta orang Bali yang mempraktikkan kebudayaan Bali secara *Tri Kaya Parisudha* (pikiran, ucapan, dan tindakan) dalam kehidupan bermasyarakat tanpa mengabaikan asas multikulturalisme.

Abstract: This article is about the problem of socio-cultural change on Balinese community that is caused by globalization. This brings about nervousness on Balinese about the endurance of Balinese culture. Thus, rise an expression of *Ajeg Bali* movement as a solution in order to keep the Balinese culture existed. In this context, education can play an important role, such in the form of "*Pendidikan Kebudayaan Bali-PKB*" (Education of Balinese Culture). PKB can be applied in formal education institution, with the aim of, not only build the Balinese people as real Balinese physically (performance), but it's more important to make them as the real Balinese on socio-cultural. In this way Balinese people will practice the Balinese culture based on *Tri Hita Karana* (though, words, and action) in their daily life without ignoring the principle of multiculturalism.

Kata kunci: perubahan budaya, *ajeg bali*, pendidikan kebudayaan bali

Manusia berbudaya merupakan cita-cita pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap masyarakat berada di dalam wadah suatu negara. Negara memiliki pemerintahan yang menggariskan tujuan negara dalam bidang pendidikan. Berkenaan dengan itu setiap pemerintah menetapkan politik pendidikan yang menggariskan tipe ideal pembudayaan manusia lewat pendidikan. Politik pendidikan yang digariskan oleh pemerintah bergantung pada ideologi yang dianutnya (Widja, 2009). Dalam konteks ini ideologi dapat dimaknai sebagai "seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama (*common goods*), atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik" (Rohman, 2009: 19-20). Keberlakuan ideologi dalam suatu masyarakat menimbulkan

implikasi, bahwa pendidikan tidak hanya merupakan transfer pengetahuan, keterampilan dan sikap, tetapi terkait pula dengan ideologi yang berlaku dalam suatu negara. Ideologi yang berlaku dalam masyarakat tidak saja ideologi negara, yakni Pancasila, tetapi juga ideologi lokal, misalnya masyarakat Bali mengenal ideologi *Tri Hita Karana*.

Dengan demikian setiap penyelenggaraan pendidikan terkait dengan penanaman, baik ideologi nasional maupun ideologi lokal. Namun, masalahnya menjadi rumit, karena di balik itu ada ideologi global, yakni kapitalisme. Ideologi kapitalisme mempengaruhi masyarakat Indonesia, termasuk Bali sebagai akibat dari adanya globalisasi. Globalisasi mengakibatkan Bali menjadi bagian dari

kampung global sehingga unsur-unsur kebudayaan global, terutama ideologi kapitalisme masuk pula ke Bali. Hal ini menimbulkan perubahan yang drastis pada masyarakat Bali. Berkenaan dengan itu ada dua masalah yang menarik dikaji lewat artikel ini, yakni: *pertama*, bagaimana bentuk perubahan kebudayaan Bali pada era globalisasi. *Kedua*. Bagaimana aplikasi Pendidikan Kebudayaan Bali sebagai strategi pemertahanan kebudayaan Bali atau apa yang lazim disebut *Ajag Bali*?

Dalam rangka menjawab kedua masalah ini dilakukan studi kepustakaan, dalam bentuk penelaahan terhadap buku-buku atau bahan tercetak lainnya yang relevan dengan masalah yang dikaji. Kerangka teori yang digunakan sebagai landasan berpikir adalah teori kritis sebagaimana yang lazim digunakan dalam Kajian Budaya (Widja, 2009). Adapun paparan atas jawaban terhadap kedua masalah tersebut dapat dicermati pada uraian sebagai berikut.

PEMBAHASAN

Masyarakat selalu terikat pada perubahan sosiobudaya. Pendidikan adalah subsistem dalam sistem sosiobudaya (Sanderson, 1993). Karena itu, perubahan yang terjadi dalam masyarakat menuntut penyesuaian terhadap sisten pendidikan agar kelangsungan hidup suatu masyarakat terjaga secara baik. Adapun perubahan sosiobudaya yang terjadi pada masyarakat Bali dan bagaimana sebaiknya pendidikan dalam hal ini Pendidikan Kebudayaan Bali mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan sosiobudaya dapat dicermati pada paparan sebagai berikut.

Perubahan Sosiobudaya pada Masyarakat Bali

Globaliasi yang bertumpu pada ideologi pasar menerpa kehidupan masyarakat Bali. Gejala ini ditandai oleh semakin meluasnya pasarisasi, terlihat pada semaraknya pusat-pusat perbelanjaan *supermarket* di kota provonsi dan kota-kota kabupaten. *Supemarket* memiliki keturunan, yakni minimarket, toserba dan waserba yang menyebar sampai ke desa-desa. Globalisasi menyatu dengan budaya Amerika (Serikat). Karena itu, bersamaan dengan

globalisasi, maka penyebaran budaya Amerika semakin luas, sehingga masyarakat Bali mengalami Amerikanisasi. *Coca-Cola* adalah simbol budaya Amerika sehingga globalisasi, selain disamakan dengan Amerikanisasi, lazim pula disamakan dengan *Coca-Colanisasi* (Atmadja, 2008; Piliang, 2008). Gejala ini tidak bisa dilepaskan dari pendidikan, di mana orang berpendidikan yang sekaligus berarti bersentuhan dengan modernisasi, acap kali memaknai kemodernan sama dengan pengadopsian budaya Amerika (Barat). Berkenaan dengan itu, maka pendidikan bukannya memperkuat basis budaya Bali, melainkan justeru sebaliknya, yakni mengantarkan masyarakat Bali ke *Amerikanisasi* atau ke arah *Coca-Colanisasi*.

Tabel 01: Arah Perubahan Masyarakat Bali sebagai Akibat dari Globalisasi (Amerikanisasi atau Coca-Colanisasi)

Perubahan dari	Ke
Ekonomi subsistensi dominan, sedangkan ekonomi pasar hanya sebagai pelengkap	Ekonomi pasar menguat, bahkan keseluruhan aspek kehidupan masyarakat Bali mengalami pasarisasi yang hebat
Kolektivitas (<i>menyama beraya</i>) sangat tinggi.	Individualitas menguat, bahkan berlaku kebiasaan mati iba hidup kae
Masyarakat tertutup/semi tertutup (melokal, menasional)	Masyarakat terbuka tidak saja menasional, tetapi juga mengglobal. Bali bagian dari kampung global sebagai konsekuensi globalisasi.
Monokultur (etnik Bali, Agama Hindu, budaya Bali)	Multikultur (multietnik, multi-bangsa atau multination dan multiagama, budaya) menyebar atau membentuk kantong-kantong sosiobudaya sehingga melahirkan multikultur subkultur
Mengutamakan aspek spiritual	Menonjolkan aspek material
Mengutamakan aspek rohaniah (pikiran, budi dan kesadaran menguasai tubuh)	Menonjolkan aspek badaniah (tubuh mengendalikn pikiran, budi dan kesadaran sehingga manusia terjebak pada syahwatisme atau kamaisme)
Mengutamakan isi dan kedalaman penghayatan sehingga cenderung memegang etos kesederhanaan.	Mengutamakan kulit atau penampilan (penampilanisme, lookisme) sehingga cenderung berpegang pada etos kemewahan.
Peran orang tua sebagai pendidik di dalam keluarga dan bale banjar sebagai ruang bagi penyelenggaraan pendidikan di luar sekolah sangat kuat.	Peran orang tua sebagai pendidik di dalam keluarga dan bale banjar sebagai ruang bagi penyelenggaraan pendidikan di luar sekolah melemah. Hal ini digantikan oleh TV mengajarkan manusia sebagai homo consumer.
Label Pulau Dewata	Label Pulau Denawa
Label Pulau Surga	Label Pulau Neraka

Amerikanisasi secara disadari maupun tidak disadari membawa perubahan sosiobudaya yang amat drastik pada masyarakat Bali. Hal ini dapat dicermati pada tabel 01 sebagai berikut.

Berdasarkan tabel 01, terlihat bahwa globalisasi atau Amerikanisasi, ditambah lagi dengan kebijakan pendidikan yang meminggirkan akhlak dan moral pendidikan agama, sejarah, PPKn dan budi pekerti tidak terpinggirkan, berdampak yang tidak diinginkan bagi pemertahanan budaya Bali. Masyarakat Bali berubah, misalnya dari label Bali sebagai Pulau Surga berubah menjadi Bali sebagai Pulau Neraka atau dari Label Pulau Dewata berubah menjadi Label Pulau Denawa. Kondisi ini menandakan, bahwa masyarakat dan kebudayaan Bali sedang sakit. Bahkan, meminjam gagasan Koesoema A. (2009) bisa dikatakan, bahwa Bali memasuki *Zaman Keblinger*. Kondisi ini telah disadari oleh berbagai pihak, tercermin dari adanya gerakan politik identitas, yakni *Ajeg Bali*. Hanya saja, penjabaran gagasan *Ajeg Bali* pada tataran konsep yang bisa diaplikasikan guna menyembuhkan penyakit yang menjangkiti masyarakat dan kebudayaan Bali, tampaknya masih memerlukan diskusi yang intensif dengan melibatkan berbagai pihak secara multidisipliner.

PKB: Alternatif Mewujudkan Ajeg Bali

Dalam konteks inilah pendidikan bisa memainkan peran penting baik dalam konteks *Ajeg Bali* maupun sebagai tindakan preventif dan kuratif dalam pemeliharaan kesehatan budaya Bali. Hal ini tidak hanya karena pendidikan adalah proses pembudayaan termasuk di dalamnya ideologisasi, tetapi diperkuat pula oleh keterkaitan erat antara pendidikan dan kebudayaan. "Pendidikan dan kebudayaan ibarat keping mata uang logam, antara sisi yang satu dengan sisi satunya lagi tidak bisa saling dilepaskan. Pendidikan tanpa kebudayaan menjadi tidak bermakna, sebaliknya kebudayaan tanpa pendidikan tidak akan berpijak di bumi" (*Educare*, Nomor 8/IV, November 2007: 4). Jika pendidikan disepakati sebagai strategi kebudayaan untuk mewujudkan *Ajeg Bali*, maka muncul pertanyaan bagaimana sebaiknya pendidikan dibangun agar pendidikan

berperan dalam pengembangan budaya Bali yang sehat?. Jawaban atas pertanyaan ini adalah pendidikan perlu menyertakan kebudayaan Bali atau mengembangkan apa yang disebut Pendidikan Kebudayaan Bali (PKB). PKB diprogramkan dalam pendidikan formal atau sistem persekolahan di Bali, terutama pada pendidikan dasar maupun menengah dengan pendekatan yang berbeda sesuai dengan azas psikologi belajar.

Sasaran PKB tidak hanya memberikan pengetahuan tentang kebudayaan Bali, tetapi yang lebih mendasar adalah membalikan orang Bali agar menjadi orang Bali. Dengan kata lain bisa dikemukakan, bahwa PKB pada dasarnya sama dengan Balinisasi terhadap orang Bali. Menjadikan orang Bali sebagai orang Bali, meminjam gagasan Berger dan Luckmann (1966) berarti, bahwa melalui PKB, seseorang mengalami proses internalisasi agar mampu memanggalkan dirinya dengan nilai, norma dan pengetahuan lokal termasuk di dalamnya kearifan lokal atau kebudayaan sebagai aspek kognitif dan aspek evaluatif yang dimiliki oleh masyarakat Bali. PKB tidak berhenti hanya pada tataran internalisasi, melainkan harus pula sampai ke tataran eksternalisasi, yakni memunculkan aspek kognisi dan aspek evaluatif yang diinternalisasikannya dalam bentuk ujaran dan tindakan.

Jadi, melalui internalisasi dan eksternalisasi PKB hendaknya membalikan orang Bali secara *Tri Kaya Parisudha*, yakni Bali dalam pikiran (*manacika*), Bali dalam ucapan (*wacika*), dan Bali dalam perbuatan (*kayika*). Balinisasi dalam pikiran mengharuskan orang Bali menguasai aspek kognitif dan evaluatif tentang kebalian. *Manacika* terkait pula dengan Agama Hindu sehingga Balinisasi pikiran harus disertai dengan pendidikan Agama Hindu. Pendidik adalah ideologisasi, sehingga Balinisasi dalam pikiran harus mengarah pada penanaman ideologi dominan yang berlaku pada masyarakat Bali, yakni *Tri Hita Karana*. Balinisasi dalam *wacika* terkait dengan pengajaran Bahasa Bali. Sedangkan Balinisasi dalam *kayika* berbentuk pelatihan, praktik atau tindakan nyata (termasuk ujaran) yang dilakukan oleh peserta didik, paling tidak pada lingkungan sekolahnya. Jadi, PKB tidak hanya

menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga aspek sikap dan psikomotorik sebagai satu kesatuan.

Balinisasi melalui PKB paling tidak menyaratkan ada tiga gugus bahan ajar, yakni: *pertama*, aspek institusi pendidikan nilai, norma, dan pengetahuan lokal dalam konteks budaya Bali. *Kedua*, pendidikan/pengajaran Bahasa Bali. *Ketiga*, Pendidikan Agama Hindu. Pengajaran Bahasa Bali dan Pendidikan Agama Hindu sudah berjalan sehingga pelaksanaannya hanya memerlukan pemantapan agar lebih berdayaguna dalam proses maupun pencapaian hasil pembelajarannya. Sebaliknya, yang memerlukan penggarapan secara lebih serius adalah PKB dalam konteks pendidikan nilai, norma, dan pengetahuan lokal tentang kebalian. Selama ini memang sudah ada pengajaran muatan lokal (mulok) di sekolah-sekolah. Pengajaran muatan lokal bisa dipandang sebagai bentuk Balinisasi terhadap peserta didik. Namun ada kecenderungan, bahwa pengajaran muatan lokal direduksi menjadi pemberian keterampilan, misalnya *majejahitan*, *maulat-ulation*, dll. Pengajaran muatan lokal seperti ini memang penting, namun akan lebih berharga dilihat secara aksiologi, jika pengajaran muatan lokal lebih menitik kepada masalah-masalah yang lebih mendasar, yakni mengenai pendidikan nilai, norma, dan pengetahuan lokal tentang kebalian, terutama terkait dengan kearifan lokal.

PKB sangat memungkinkan mengingat adanya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional. Pada Pasal 17 Ayat (1), PP tersebut menjelaskan, bahwa "... *kurikulum tingkat satuan pendidikan SD-SMA atau berbentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai satuan pendidikan, potensi daerah, sosial budaya, dan peserta didik*" (Setiawan, 2008: 39). Jadi, jelas ada legitimasi formal untuk menerapkan PKB pada satuan pendidikan di Bali, mulai dari SD-SMA dan satuan pendidikan lainnya. Peluang ini menerapkan PKB tentu tidak hanya mendasarkan diri pada legitimasi formal, melainkan bisa pula dilihat dari aspek kemampuannya, yakni PKB bisa membalikan orang Bali. Hal ini sangat penting, karena secara faktual banyak anak taman SMA, tidak faham terhadap unsur-unsur kebudayaan Bali yang ada disekitarnya,

misalnya tentang *desa pakraman*, sistem pertanian termasuk di dalamnya subak, tata ruang yang terkait dengan *asta kosala-kosali* dan *asta bhumi*, sistem kekerabatan, *dadia*, sistem perkawinan menurut hukum adat Bali, dll. Jika internalisasi pengetahuan seperti ini bisa diwujudkan lewat PKB, maka kebalian orang Bali pada aspek *wacika* dan *kayika* akan terealisasi secara lebih baik yang sekaligus berarti pula pemertahanan budaya Bali di tengah derasnya terpaan globalisasi menjadi lebih terjamin.

PKB seperti ini bisa dilakukan lewat pembenahan terhadap pengajaran muatan lokal yang telah ada, yakni direvitalisasi agar lebih mengarah kepada PKB. Namun, bisa pula PKB diintegrasikan dengan mata pelajaran yang ada di sekolah, misalnya di SMA, PKB diintegrasikan dengan matapelajaran Sosiologi atau Antropologi. Apapun bentuk pengorganisasian materi ajar PKB, apakah berdiri sendiri dalam bentuk pengajaran muatan lokal yang direvitalisasi atau terintegrasi dalam matapelajaran Sosiologi/ Antropologi, diperlukan legitimasi pemerintah. Desentralisasi pendidikan memberikan peluang yang sangat bagus bagi pemerintah daerah (kabupaten, kota, tanpa mengabaikan peran pemerintah provinsi) untuk membuat rancangan PKB yang terlegitimasi secara politis dan akademis. Legitimasi secara politis berwujud peraturan daerah yang mewajibkan penerapan PKB. Untuk itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan lembaga legislatif (DPRD Kabupaten dan atau DPRD Provinsi). Sedangkan, legitimasi akademis berarti ada kajian pakar dalam konteks mempersiapkan teknologi pembelajaran, misalnya buku pegangan guru, metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dll. Berkenaan dengan itu maka peran Dinas Kebudayaan Provinsi Bali atau lembaga sejenis pada tingkat kabupaten/kota sangat penting berperan sebagai *leading sector*.

PKB sebagai strategi budaya membalikan orang Bali tidak bermakna hanya menjadikan orang Bali sebagai pewaris kebudayaan, melainkan seperti dikemukakan Galtung (dalam Windhu, 1992: 10), bahwa "... pendidikan sebagai proses yang tidak hanya memberikan akses membentuk kebudayaan, tetapi juga memungkinkan refleksi

atas kebudayaan secara kritis dan kreatif". Begitu pula dengan meminjam gagasan Koesoema A. (2009) melalui PKB guru tidak sekedar mewariskan kebudayaan, melainkan yang lebih penting adalah membentuk peserta didik mandiri dan terlibat aktif dalam konteks mewujudkan masyarakat Bali adaptif dengan tuntutan zaman, tanpa kehilangan kepribadiannya sebagai orang Bali. Jadi, PKB hendaknya membawa peserta didik untuk secara terus menerus berperan aktif, tidak hanya sebagai pewaris kebudayaan Bali, melainkan berkewajiban pula membentuk/menambahinya lewat *Tri Kaya Parisudha* yang kritis dan kreatif tanpa mengabaikan identitas kebaliannya. Karena itu, PKB bukan indoktrinasi budaya Bali, melainkan lebih mengarah kepada dialog budaya lintasgenerasi maupun antar-generasi guna menghasilkan orang Bali yang berkebalian secara *Tri Kaya Parisudha*. Dalam konteks ini meminjam gagasan Karim (2009) maka pendekatan belajar kritis transformatif sangat penting berpikir kritis, mempertanyakan, menimbang dan beragumen.

Tabel 01 menunjukkan Bali tidak lagi monokultur, melainkan multikultural. Apalagi adanya globalisasi dan migrasi antarpulau yang tidak bisa dibendung, sehingga corak kemultikulturalan masyarakat Bali bertambah kompleks. Berkenaan dengan itu maka PKB tidak boleh melahirkan manusia Bali yang etnosentrismennya terlalu kuat, apalagi melahirkan eksklusivisme atas dasar etnik/agama. Kondisi ini menimbulkan implikasi, bahwa PKB hendaknya diarahkan pada usaha membalikan orang Bali yang insklusif atau meminjam gagasan Parekh (2008) menjunjung tinggi asas multikulturalisme. Atau seperti dikemukakan Muharyono (2007) PKB sebagai proyek membalikan orang Bali, harus dikaitkan dengan pendidikan apresiasi budaya nasional. Artinya, PKB memang memiliki sasaran ideal, yakni membalikan orang Bali, namun di balik itu mereka harus menyadari bahwa Bali adalah bagian dari Indonesia, dan Indonesia adalah multikultur sehingga me-*liyan*-kan orang lain hanya karena mereka bukan orang Bali, tidaklah pada tempatnya.

Apalagi jika dikaitkan dengan ideologi Negara Pancasila, maka multikulturalisme (*Bhineka Tunggal Ika*) merupakan persyaratan yang tidak bisa ditawar

dalam konteks kelangsungan hidup NKRI. Gagasan ini berlaku pula pada masyarakat Bali. Bali tidak bisa hidup tanpa berpegang pada multikulturalisme era globalisasi adalah era kemultikulturalan (Parekh, 2008). Pendek kata, tipe ideal orang Bali yang dibentuk lewat PKB adalah mewujudkan orang Bali yang ber-*Tri Kaya Parisudha* dalam konteks budaya Bali. Selain itu, dia harus pula menganut asas multikulturalisme atau sebagai *homo pluralis*, yakni manusia yang mengakui adanya keragaman etnik, agama, kebudayaan, dll. dalam konteks kesetaraan, toleransi, kebersamaan, keadilan, kerja sama, nirkekerasan, dialogis, dll. PKB harus memposisikan Balinisme dan multikulturalisme atau Balinisasi dan multikulturalisasi sebagai satu kesatuan, tak ubahnya seperti dua sisi mata uang logam. Gagasan ini merupakan pula sasaran yang sebaiknya ditegakkan dalam konteks politik identitas yang mewarnai wacana pemertahanan kebudayaan Bali, yakni *Ajag Bali*.

PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Bali tidak bisa menghindarkan diri dari globalisasi, karena Bali adalah bagian dari kampung global. Globalisasi di satu sisi berdampak positif, namun di sisi yang lain bisa pula memunculkan dampak negatif, sebagai tercermin pada perubahan sosiobudaya yang menerpa masyarakat Bali yang berujung pada kondisi sedang sakit. Hal ini memerlukan penanggulangan melalui pendidikan. Pendidikan bisa me-nanggulangi penyakit yang dihadapi oleh masyarakat Bali yang sekaligus berarti pula berkontribusi bagi pencapaian tujuan gerakan *Ajag Bali*, mengingat makna pendidikan pada dasarnya adalah proses pembudayaan, yakni menjadikan manusia sebagai makhluk berbudaya. Dalam konteks inilah PKB dapat diterapkan dalam rangka membudayakan manusia Bali baik secara lahiriah maupun batiniah dalam konteks *Tri Kaya Parisudha* orang Bali dalam cara berpikir, berujar dan bertindak. Namun, penguatan identitas ke-Bali-an harus tetap dalam bingkai multikulturalisme *Bhineka Tunggal Ika*.

Berkenaan dengan itu ada beberapa hal yang bisa disarankan, *pertama*, pelajaran muatan lokal di sekolah perlu direformulasi agar lebih menyentuh aspek substansial yang terkait dengan inti kebudayaan Bali muatan lokal tidak sama dengan *meje-jahitan*, membuat *kelakat*, dll. *Kedua*, diperlukan penyusunan buku ajar yang membantu guru dalam mengajarkan kebudayaan Bali. Buku ini disusun oleh orang yang mumpuni dalam bidangnya. *Ketiga*, ada kebijakan pemerintah yang memberikan dukungan misalnya, tata aturan, dana, dll, sehingga PKB

bisa terlaksana secara baik. *Keempat*, pendidikan Agama Hindu dan Bahasa Bali perlu ditingkatkan kualitasnya dengan melakukan pembenahan terhadap komponen-komponen yang tercakup dalam sistem pembelajaran. *Kelima*, masalah yang dihadapi dalam konteks Ajeg Bali sangat kompleks, karena itu membutuhkan kerja sama antara berbagai pihak lewat suatu kerja yang bersinergi guna merumuskan gagasan tentang Ajeg Bali lengkap dengan praksisnya lewat PKB.

DAFTAR RUJUKAN

- Atmadja, N.B. 2008. *Bali pada Era Globalisasi Pulau Seribu Pura Tidak Seindah Penampilannya*. Yogyakarta: LKiS.
- Berger, P.L. dan Th, Luckmann. 1966. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Doublety.
- Educare, Nomor 8/IV, Novemver 2007. "Pendidikan dan Kebudayaan Menjadi Tidak Bermakna". Halaman 4-6.
- Fakih, M. 2003. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ismail, F. 1999. *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*. Yogyakarta: LP3ES.
- Karim, M. 2009. *Pendidikan Kritis Transformatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Koesoema A, D. 2009. *Pendidik Karakter di Zaman Kablinger*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Muharyono HS., S.B. 2007. "Pendidikan Apresiasi Budaya Nasional Upaya Membangun Jati Diri Bangsa". *Educare*, Nomor 8/IV, Novemver 2007. Halaman 22-23..
- Perekh, B. 2008. *Rethinking Multiculturalism Keragaman Budaya dan Teori Politik*. (Bambang Kukuh Adi Penerjemah). Yogyakarta: Kanisius.
- Picard, M. 2006. *Bali Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*. (Jean Couteau dan Warih Wisatsana Penerjemah). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Piliang, Y.A. 2008. "Logosenrisme Gaya Jawa Memahami Semiotika Politik Orde Baru". Dalam Arief Adityawarman S. *Propaganda Pemimpin Politik Indonesia Mengupas Semiotika Orde Baru Soeharto*. Jakarta: LP3ES. Halaman xv-xxix.
- Rohman, A. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta; LaksBang Mediatama.
- Riyanto, G. 2009. Peter L. Berger *Perspektif Metateori Pemikiran*. Jakarta: LP3ES.
- Sanderson, S.K. 1993. *Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*. (A.F. Syaifuddin Penerjemah). Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiawan, B. 2008. *Agenda Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group.
- Suminto, H.H. 1985. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- Tilaar, H.A.R. dan R. Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widja, I Gde. 2009. *Pendidikan sebagai Ideologi Budaya suatu Pengantar ke Arah Pendidikan Kritis*. Denpasar: Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Kajian Budaya Universitas Indonesia.
- Windhu, I.M. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yamin, M. 2009. *Menggugat Pendidikan Indonesia Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.